



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 25 November 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/ Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tidak terpisahkan dengan Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat daftar komulatif terbuka dan dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Setiap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki Naskah Akademik sebelumnya, dapat disertai penjelasan/keterangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 November 2020

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pjs. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 33 TAHUN 2020
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

NO	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1.	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pengaturan Insentif dan kemudahan penanaman modal dalam rangka untuk mendorong investasi daerah	DPRD (Komisi A)	Baru	Triwulan I	
2.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Meningkatkan PAD Khususnya Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul	DPRD (Komisi B)	Perubahan	Triwulan I	
3.	Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama	Mengatur : mekanisme perizinan, pendirian menara telekomunikasi, dampak sosial kemasyarakatan.	DPRD (Komisi C)	Baru	Triwulan I	
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Menyesuaikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	DPRD (Komisi D)	Perubahan	Triwulan I	

5.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2024	Perencanaan Pembangunan sesuai masa jabatan Kepala Daerah Periode 2021-2024	Bupati	Baru	Triwulan II	
6.	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pengaturan Perangkat Daerah sesuai dengan RPPJMD Tahun 2021-2024	Bupati	Baru	Triwulan II	
7.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Rutin APBD	Bupati	Baru	Triwulan II	
8.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Rutin APBD	Bupati	Baru	Triwulan III	
9.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Bertujuan untuk memperbaiki retribusi IMB, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan, dan penyempurnaan perizinan trayek.	DPRD (Bapemperda)	Perubahan	Triwulan III	
10.	Penyelenggaraan Pasar Rakyat	Pengaturan Pasar Rakyat : Penyediaan sarana prasarana, pengaturan pedagang, pendirian pasar rakyat oleh swasta	Bupati	Perubahan	Triwulan III	

11.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dearah	Penyesuaian dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Bupati	Perubahan	Triwulan III	
12.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Rutin APBD	Bupati	Baru	Triwulan IV	

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO